

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU  
MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA PEMILU TAHUN  
2019 BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA NEPUBLIK INDONESIA  
( Studi Kuala Dasal )**

Wesi Tawar Niate<sup>1</sup>, Heryani, S.Thi. M.Sy<sup>2</sup>, Nurul Hidayah Tumadi, Lc.MA<sup>3</sup>

[WesiTungkal@gmail.com](mailto:WesiTungkal@gmail.com)

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

<sup>3</sup> Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

**ABSTRAK**

Suasana politik sangat mempengaruhi kehidupan sosial termasuk masalah ketertiban dan keamanan masyarakat (baik secara fisik maupun psikis), seperti momen-momen politis yang terjadi di Indonesiadiantaranya adalah saatmomen Pemilihan Umum (Pemilu). Pada 17 April 2019 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu yang sedikit berbeda dari tahun pemilu 2014, yaitu dengan konsep pemilihan serentak.

Undang- undang sudah mengatur, bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang di tentukan dapat dipilih dan memilih.<sup>1</sup> Karena pada setiap momen penyelenggaraan pemilu sangat banyak isu-isu Suku, Adat, Ras, dan Agama (SARA) yang tidak baik dijadikan bahan untuk bersaing secara politis oleh politisi, juga dengan banyaknya penyebaran berita bohong dan hasutan, yang sangat memungkinkan terjadinya konflik yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah bahkan sampai ke desa.

Merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian mempunyai wewenang untuk membantu melaksanakan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum, isu-isu bahwa adanya perangkat desa yang mengharuskan warga desa memilih salah satu paslon dan adanya tokoh atas nama suku tertentu juga menyeru untuk memilih salah satu pasangan calon dan berbagai macam konflik lainnya seperti berita bohong (Hoax), ras, dan hasutan, hal inilah yang terjadi di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keefektifan proses peran dan fungsi Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dalam menjalankan pemilihan umum di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana. Hal 29.

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran serta Kepolisian dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban pemilihan umum tahun 2019 banyak mengambil sikap berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, demi dan dalam menjalankan fungsinya Polri di daerah hukum di Kecamatan Tungkal Ulu (Polsek) secara formal telah menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan Undang - Undang khususnya di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kata kunci: *Peran, Kepolisian, Pemilihan Umum, Kuala Dasal*

## **PENDAHULUAN**

Negara didirikan sebagai tempat untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Tujuan negara tergantung pada filsafat yang menjadi pedoman negara.<sup>2</sup>Tujuan dari negara secara umum sangat berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara atau badan-badan negara yang harus diadakan.<sup>3</sup>

Penjelasan UUD'45 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan. Negara Hukum adalah suatu negara yang dalam kehidupan bernegara, berpemerintah, dan bermasyarakat selalu mengacu pada hukum yang berlaku sebagai pedomannya. Untuk menegakkan hukum, perlu ditopang oleh pilar-pilar penyangga. Artinya, semakin kokoh pilar tersebut, semakin tegak pula hukum, dan semakin lemah pilar tersebut maka semakin lemah pula penegakan hukum. Pilar-pilar tersebut meliputi:<sup>4</sup>

1. Sistem peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksana hukumnya;
3. Penegak hukumnya; dan
4. Sistem peradilan.

Negara hukum menjadikan hukum sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan demi tercapainya

---

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 146.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 147.

<sup>4</sup> Edwar, *Supremasi Hukum DI Indonesia*. Pada Jurnal Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2012, hlm. 57-58.

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasar )*

---

tujuan suatu negara.<sup>5</sup> Artinya ketika hukum bisa ditegakkan, maka akan tercapai tujuan nasional dari negara hukum, diantaranya demi mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD'45.<sup>6</sup> Oleh karena itu, demi terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, maka Negara Indonesia membentuk Lembaga Kepolisian berdasarkan Pasal 30 ayat 2, 4, 5 UUD'45 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri). Polri berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Suasana politik sangat mempengaruhi kehidupan sosial termasuk masalah ketertiban dan keamanan masyarakat (baik secara fisik maupun psikis), seperti momen-momen politis yang terjadi di Indonesiadiantaranya adalah saatmomen Pemilihan Umum (Pemilu). Pada 17 April 2019 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu yang sedikit berbeda dari tahun pemilu 2014, yaitu dengan konsep pemilihan serentak.

Undang- undang sudah mengatur, bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang di tentukan dapat dipilih dan memilih.<sup>7</sup> Karena pada setiap momen penyelenggaraan pemilu sangat banyak isu-isu Suku, Adat, Ras, dan Agama (SARA) yang tidak baik dijadikan bahan untuk bersaing secara politis oleh politisi, juga dengan banyaknya penyebaran berita bohong dan hasutan, yang sangat memungkinkan terjadinya konflik yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah bahkan sampai ke desa.

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 19-20.

<sup>6</sup> Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana. Hal 29.

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Keteraturan Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

Hasil observasi sementara yang peneliti lakukan pada tanggal 03 maret 2019 Pukul 19:30 Wib berbincang melalui hanphone dengan seorang warga desa Kuala Dasal bernama Gustina Herwingga, memang terdapat banyak potensi-potensi konflik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti memanasnya gaya komunikasi antar warga yang berbeda pilihan, saling sindir di media sosial, bersahut-sahutan dalam meneruskan berita-berita yang berasal dari media nasional yang tanpa dicek kebenarannya, mulai mengikuti istilah yang berujung polarisasi antara dua kubu pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden seperti cebong dan kampret, Islam radikal dan Islam moderat, dan lain-lain. Hal tersebut juga terjadi di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu yang salah seorang warganya sempat berbincang kepada peneliti tentang isu-isu bahwa ada perangkat desa yang mengharuskan warga desa memilih salah satu paslon, dan ada tokoh atas nama suku tertentu yang menyeru memilih salah satu paslon, dan salah satu paslon sedang membawa misi keagamaan yang bertentangan, dan lain-lain. Padahal isu atau seruan itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Karena pelanggaran pemilu merupakan perbuatan dilarang oleh undang-undang pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarannya.<sup>8</sup> Tapi warga sudah terlebih dahulu mendengar isu nasional bahwa salah satu paslon memang memanfaatkan posisi kekuasaannya dan menjual agama untuk mencari suara. Hal demikian membuktikan bahwa dampak dari isu-isu nasional sampai ketingkat daerah bahkan tingkat desa.

Tungkal Ulu merupakan satu diantara 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menarik untuk diteliti, karena dari pengamatan sementara peneliti bahwa masyarakat desanya merasakan ketidakamanan dan ketidaktertiban terutama secara psikologis akibat isu-isu yang beredar dari perorangan atau kelompok, langsung atau lewat media massa, yang informasinya berasal dari salah satu pendukung paslon atau dari pihak yang tidak dikenal sama sekali, dan kondisi itu sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik saat pelaksanaan Pemilu 2019.

---

<sup>8</sup> Op.Cit Fajlurahman Juhdi, Hal 232

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

Kondisi sosial di Desa Kuala Dasal sebelum Pemilu 2019 sangat terganggu oleh kondisi politik nasional yang banyak menggunakan isu-isu SARA dan berita bohong atau *hoax* saat melakukan kampanye sebagaimana peneliti amati secara langsung saat melaksanakan KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) tahun 2019, hal itu terbukti dengan banyaknya informasi yang warga desa dapatkan dari sumber yang tidak jelas seperti adanya perintah perangkat desa untuk memilih salah satu paslon, jika tidak memilih yang sudah ditentukan maka akan dipersulit saat ingin mencoblos, akan susah pembangunan desa, ini demi suku tertentu, demi agama tertentu, dan lain-lain. Padahal informasi itu tidak benar serta tidak dapat dibuktikan. Informasi-informasi yang tidak jelas seperti itu menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan khusus terkait peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilu 2019 di tingkat desa, dan penelitian tersebut sangat efektif apabila dilakukan di Desa Kuala Dasal karena didukung oleh pengalaman dan pengamatan langsung dari peneliti.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Pada Pemilu 2019 Di Desa Kuala Dasal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia?
2. Apa kendala dan upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu dalam Mencegah atau Menindak Konflik Yang Akan Atau Sedang Terjadi Saat Pemilu Di Desa Kuala Dasal?

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Dan peneliti memilih jenis penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti dalam

penelitian ini adalah tentang Peran Polsek Kecamatan Tungkal Ulu dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada saat Pemilu 2019 di Desa Kuala Dasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Penelitian ini bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta penerapannya atau prakteknya.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Negara Indonesia pada hakekatnya menghendaki keadilan bagi setiap warga negaranya, oleh karena itu disusunlah aturan-aturan agar negara dijalankan oleh pemerintah yang berdasarkan hukum. Dan hukum dibentuk agar keadilan tercipta dengan aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga-lembaga negara kemudian dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang lebih spesifik. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat lembaga tinggi negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden-Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-Legislatif, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY)-Yudikatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemilihan umum merupakan kegiatan yang sangat penting dan sehingga dibutuhkan suatu stabilitas dan keamanan dalam menjamin kegiatan pemilihan umum berjalan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan disampaikan ketua PPS Kuala Dasal melalui wawancaranya:

“Pemilihan Umum merupakan kegiatan penting untuk suatu kemajuan bangsa, untuk menjamin demokrasi tersebut dan menjaga situasi dan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadmedia Group, 2005, hlm. 56.

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

kondisi yang ada maka diperlukan adanya pihak keamanan yang bahu membahu dalam menjaga kegiatan yang harus bersinergi dengan yang lainnya agar tercipta kondisi yang kondusif dalam kegiatan tersebut.<sup>10</sup>”

Petugas negara yang secara khusus mengurus keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat harus tetap ada, demi tercapainya tujuan negara. Dengan alasan tersebut Negara Indonesia membentuk Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung terhadap Presiden.

Polri memiliki fungsi menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam segala fenomenanya. Dalam aktivitasnya, masyarakat selalu melakukan interaksi untuk mengekspresikan keinginannya dalam hidup, baik itu keinginan dalam bidang ekonomi, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Untuk kegiatan pemilu ini pihak kepolisian dibantu anggota linmas dalam menjaga pelaksanaan pemilihan umum, hal ini dibenarkan oleh bripta Yasi, :

“ dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 pihak kepolisian diwakili oleh BKTm masing-masing desa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan dibantu anggota linmas yang ada diwilayah tersebut”.<sup>11</sup>

Keinginan masyarakat dalam bidang politik salah satunya ditentukan melalui pilihan politiknya saat perhelatan pemilihan umum (pemilu) yang setiap 5 tahun sekali diselenggarakan. Pada 17 April 2019 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu yang sedikit berbeda dari tahun pemilu 2014, yaitu dengan konsep pemilihan serentak, yaitu memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres), Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub), Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabub dan Cawabub), Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk eksekutif, Calon Dewan Perwakilan

---

<sup>10</sup>Dakep nurdin ansori, SH. MH (Kapolsek Tungkal Ulu), Wawancara pada hari Rabu 23 Oktober 2019 Jam 09.07 WIB

<sup>11</sup>Bripta yasi (bktm desa kuala dasal), wawancara pada hari Kamis 24 Oktober 2019 jam 14.07 wib

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten untuk legislatif.

Penyelenggaraan pemilu (2019) sangat banyak isu-isu terkait Suku, Adat, Ras, dan Agama (SARA) yang disalahgunakan sehingga menjadi persaingan yang tidak sehat secara politis antar politisi, juga dengan banyaknya penyebaran berita bohong dan hasutan, yang sangat memungkinkan terjadinya konflik yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah bahkan sampai ke desa. Hal itu membuat pihak kepolisian sebagai penegak hukum, penjaga ketertiban dan keamanan harus mengambil sikap terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut kepala desa kuala dasal melalui wawancaranya:

“ pihak kepolisian memiliki banyak peranan dalam menjalankan fungsinya menjaga dan mengamankan pemilihan umum di wilayah kuala dasal sehingga pelaksanaan pemilihan umum di desa kuala dasal berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan”.<sup>12</sup>

Juan J Linz dan Alfred Stepan selaku pakar politik mengatakan bahwa negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi, dan memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai, serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menitik beratkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian diseluruh dunia, dirumuskanlah bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri.

---

<sup>12</sup> Pran susanto ( kepala desa kuala dasal), wawancara pada hari kamis 31 oktober 2019 jam 11:00 wib

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

Berdasarkan peran dan fungsinya, Polri tentu harus menyikapi seluruh kejadian yang terjadi di dalam negeri demi tetap terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat serta tegaknya hukum, baik itu kejadian yang bersumber dari aktivitas sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri. Banyak hal yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah membuat masing-masing daerah semakin kompleks kepentingan dan keinginannya yang tersendiri, salah satunya keinginan dan kepentingan terkait perebutan kekuasaan yang diwujudkan dalam aktivitas politik.

Kepentingan-kepentingan politik yang berbeda membuat gesekan dalam interaksi dalam masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi potensi konflik. Melihat Potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi atau bahkan terjadi sebelum dan saat penyelenggaraan pemilu, maka ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam mengawal pelaksanaan pemilu, antara lain:

Kecamatan yang menjadi wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah Kecamatan Tungkal Ulu spesialisasi Desa Kuala Dasal. Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Tungkal Ulu menjadi institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di daerah hukumnya. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang, saat, dan setelah pemilu, Polsek Kecamatan Tungkal Ulu menjalankan tugas pencegahan konflik yang mungkin saja bisa terjadi.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang anggota Polsek (atas nama Hendra) Kecamatan Tungkal Ulu menunjukkan tingkat antisipasi terhadap potensi konflik yang tinggi, yang bersumber dari pesan atau isu-isu nasional yang provokatif.

Efek dari proses perebutan kekuasaan itu sampai ke masyarakat desa, termasuk Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu khususnya dalam persoalan ancaman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Untuk mendalami persoalan tersebut, peneliti mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak yang berdasar peraturan perundang-undangan adalah pihak

yang berwenang dalam menertibkan dan mengamankan kehidupan masyarakat dalam setiap aktivitasnya.

### **Identifikasi Pontensi Konflik**

Mendeteksi dini dan mengkaji secara berkesinambungan setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang potensial menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal, menyusun sistem peringatan dini dan tanggapan dini konflik dalam rangka mencegah konflik, melakukan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan sosial yang bersumber dari proses pentahapan pelaksanaan pemilu, melakukan pemantauan terhadap setiap kondisi masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik, penggalangan terhadap berbagai komponen masyarakat, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan para peserta pemilu, yang dapat menjadi sumber konflik, menggalakkan sistem pengamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, menggunakan Strategi Perpolisian Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut mengelola Kamtibmas secara swakarsa. dalam pelaksanaan pemilihan umum PPS sendiri merasakan manfaat dalam fungsi yang dijalankan oleh pihak kepolisian hal ini dibenarkan oleh Andika melalui wawancaranya:

“Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 lalu berlangsung kondusif dengan adanya bantuan dari pihak kepolisian yang serta merta membantu jalannya pengamanan yang melibatkan semua komponen yakni linmas dan pengaman TPS yang berlangsung dengan damai dan lancar.”<sup>13</sup>

### **Pencegahan**

Pembetulan forum komunikasi bersama antara Polri dengan parpol peserta Pemilu, pengamanan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat, menggelar operasi cipta kondisi untuk memantapkan kondisi Kamtibmas agar tetap kondusif selama berlangsungnya tahapan Pemilu, melakukan dialog dengan memanfaatkan lembaga adat dan

---

<sup>13</sup> Andika Pratama ( Ketua PPS Desa Kuala Dasal ), Wawancara Pada Hari Kamis 24 Oktober 2019 Jam 13.07 WIB

melibatkan tokoh adat guna terwujudnya keharmonisan antar peserta Pemilu, menyusun nota kesepakatan antara peserta Pemilu dengan kepolisian untuk menjaga agar Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu, menjaga dan mengurangi perbedaan pendapat antar para peserta Pemilu dan berusaha untuk mengarahkannya kepada suatu persepsi yang sama, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para peserta Pemilu agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas, tentunya dengan tetap menjaga netralitas.

### **Penegakan Hukum**

Mencari penyebab munculnya konflik;

- Melumpuhkan kelompok-kelompok yang berupaya memprovokasi agar pelaksanaan Pemilu gagal;
- Mengidentifikasi pimpinan-pimpinan kelompok, provokator-provokator, dan pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan untuk menggagalkan atau memperkeruh suasana pelaksanaan Pemilu;
- Apabila muncul masalah di antara peserta Pemilu diupayakan agar penyelesaian dilakukan dengan menempuh cara dialog (musyawarah) agar tidak menimbulkan konflik yang meluas dan berkepanjangan;
- Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum secara tuntas, tegas, tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum, dengan dukungan petugas yang bekerja secara profesional, proporsional, dan procedural.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa pihak Polsek Kecamatan Tungkal Ulu telah menjalankan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada konflik yang terjadi saat pemilu 2019 berlangsung di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu.

Demi memastikan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Kuala Dasal, maka peneliti juga mengumpulkan informasi dan data dari beberapa masyarakat dengan cara mewawancarai. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

Narasumber : Sumarsih, Kamrin, Sri, Ade Tias, Lasmi Nauli Sinaga, Gustina, Nani Ernayani.

Pewawancara : Peneliti Sendiri.

Tema : Terkait Ketertiban Dan Keamanan Saat Pemilu 2019.

Waktu dan Tempat : Sekitar pukul 08.00 – 15.15 WIB pada tanggal 16 s/d 17 Februari 2020 di Desa Kuala Dasal, RT 01, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06.

Hasil Wawancara : Melalui wawancara kepada warga Desa Kuala Dasal, peneliti mendapatkan informasi terkait keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif. Karena menurut masyarakat yang peneliti wawancarai telah terjadi perubahan dalam banyak sisi sejak masa kampanye pemilu, diantaranya masih ada sikap sentimen dan memaksa (secara tidak langsung) antar warga yang diekspresikan langsung lewat komunikasi atau via media sosial.

Pandangan yang berbeda antara Polsek dan Masyarakat menunjukkan adanya masalah dalam upaya penjagaan atas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menjelang penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menunjukkan ada yang berlawanan antara apa yang seharusnya (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri) dengan yang nyatanya terjadi.

**B. Kendala Dan Upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu dalam Mencegah atau Menindak Konflik Yang Akan Atau Sedang Terjadi Saat Pemilu Di Desa Kuala Dasal**

Pelaksanaan tugas kepolisian khususnya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Polsek Kecamatan Tungkal Ulu, peneliti mendapatkan beberapa gambaran terkait kendala yang terjadi dan upaya dilakukan dalam mencegah konflik yang akan akan terjadi. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapat:

“Kesadaran politik belum terlalu dipahami masyarakat sehingga terjadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh masyarakat setempat namun dapat ditangani

dan diatasi dengan baik oleh pihak kepolisian dengan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, PPS dan pihak pemerintah desa”.<sup>14</sup>

Polsek Kecamatan Tungkal Ulu banyak mengalami kendala dalam mencegah konflik yang mungkin terjadi akibat isu-isu kepentingan politis oleh politisi nasional sampai daerah. Diantara kendala yang paling sering dihadapi adalah:

1. Tertutupnya masyarakat terhadap informasi terkait kondisi masyarakat dalam menghadapi pemilu yang belum diketahui oleh pihak Polsek Tungkal Ulu.
2. Isu-isu seperti soal SARA yang berpotensi menimbulkan konflik begitu cepat berkembang di dalam masyarakat, tapi beberapa waktu isu itu bergulir diluar pengawasan pihak keamanan, karena langsung diakses lewat telpon genggam pribadi masyarakat. Sehingga sulit bagi pihak keamanan untuk memastikan informasi apa yang mempengaruhi fikiran masyarakat.
3. Isu tentang netralitas aparat juga menjadi kendala dalam mendekati diri kepada keterbukaan masyarakat, sehingga informasi yang dibutuhkan pihak keamanan terkadang tidak cukup untuk dianalisis.

Kendala-kendala yang dihadapi pihak Polsek Kecamatan Tungkal Ulu merupakan kondisi yang sering terjadi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga upaya untuk mencegah terjadinya ketidakamanan dan ketidaktertiban tetap harus dilakukan sebagai aparat kepolisian sebagaimana azas *Est Securitas Utilitatem Populi*, yaitu Keamanan adalah Kesejahteraan Rakyat.

Data terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Kecamatan Tungkal Ulu peneliti dapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil Wawancara : Proses pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Tungkal Ulu tidak jauh berbeda dengan proses pencegahan konflik yang dilakukan oleh Kepolisian pada umumnya, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Andika Pratama (Ketua PPS Desa Kuala Dasal), Wawancara Pada Hari Kamis 24 Oktober 2019 Jam 13.07 WIB

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

1. Pembentukan forum komunikasi bersama antara Polsek dengan parpol peserta Pemilu, pengamanan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat;
2. Menggelar operasi cipta kondisi untuk memantapkan kondisi Kamtibmas agar tetap kondusif selama berlangsungnya tahapan Pemilu;
3. Melakukan dialog dengan memanfaatkan lembaga adat dan melibatkan tokoh adat guna terwujudnya keharmonisan antar peserta Pemilu;
4. Menyusun nota kesepakatan antara peserta Pemilu dengan Polsek untuk menjaga agar Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu;
5. Menjaga dan mengurangi perbedaan pendapat antar para peserta Pemilu dan berusaha untuk mengarahkannya kepada suatu persepsi yang sama;
6. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para peserta Pemilu agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas, tentunya dengan tetap menjaga netralitas; dan
7. Mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang provokatif.<sup>15</sup>

Meski aparat keamanan diperbolehkan melakukan tindakan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (diskresi), tapi upaya yang dilakukan Polsek Kecamatan Tungkal Ulu sudah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terwujudnya *to protect and to serve*, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Kesimpulan**

1. Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia salah satunya adalah keinginan untuk menjaga ketertiban dunia, artinya ketertiban tercipta diluar dan dalam diri Indonesia karena Indonesia bagian dari dunia. Dalam usaha

---

<sup>15</sup> Dakep nurdin ansori, SH. MH (Kapolsek Tungkal Ulu), Wawancara pada hari Rabu 23 Oktober 2019 Jam 09.07 WIB

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Ketertiban Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasal )*

---

memajukan kesejahteraan umum, Negara Indonesia membentuk suatu sistem pemerintahan selaku penggerak negara menuju tercapainya cita-cita negara. Pemerintah Negara Indonesia mengusahakan terjaganya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga dibentuklah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri merupakan lembaga yang menjadi salah satu pilar dari penegakan hukum, sehingga polri menjadi lapisan terdepan dalam menjaga masyarakat dengan beban tugas yang cukup berat dan cenderung individual dalam menyikapi situasi yang nyata.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menitik beratkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian diseluruh dunia, dirumuskanlah bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Polri dibagi berdasarkan daerah hukumnya meliputi Mabes, Polda, Polres, dan Polsek. Dalam masing-masing daerah hukumnya Polri menghadapi tantangan yang berbeda dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemilu 2019, Polri di daerah hukum Kecamatan Tungkal Ulu (Polsek) secara formil telah menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, khususnya di Desa Kuala Dasal. Meski Polsek Kecamatan Tungkal Ulu telah melakukan upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Desa Kuala Dasal, akan tetapi masih terdapat suasana yang tidak kondusif dalam masyarakat selaku pemilik suara dalam pemilu, khususnya gangguan ketidakamanan dalam menentukan sikap politik karena adanya isu-isu nasional yang menyebabkan perubahan sikap antar warga desa.

2. Kendala dan Upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu dalam Mencegah atau Menindak Konflik Yang Akan Atau Sedang Terjadi Saat Pemilu Di Desa Kuala Dasal yaitu Polsek Kecamatan Tungkal Ulu banyak mengalami kendala dalam mencegah konflik yang mungkin terjadi akibat isu-

isu kepentingan politis oleh politisi nasional sampai daerah. Diantara kendala yang paling sering dihadapi adalah:

- a. Tertutupnya masyarakat terhadap informasi terkait kondisi masyarakat dalam menghadapi pemilu yang belum diketahui oleh pihak Polsek Tungkal Ulu.
- b. Isu-isu seperti soal SARA yang berpotensi menimbulkan konflik begitu cepat berkembang di dalam masyarakat, tapi beberapa waktu isu itu bergulir diluar pengawasan pihak keamanan, karena langsung diakses lewat telpon genggam pribadi masyarakat. Sehingga sulit bagi pihak keamanan untuk memastikan informasi apa yang mempengaruhi fikiran masyarakat.
- c. Isu tentang netralitas aparat juga menjadi kendala dalam mendekati diri kepada keterbukaan masyarakat, sehingga informasi yang dibutuhkan pihak keamanan terkadang tidak cukup untuk dianalisis.

upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Kecamatan Tungkal Ulu terkait Proses pencegahan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses pencegahan konflik yang dilakukan oleh Kepolisian pada umumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembentukan forum komunikasi bersama antara Polsek dengan parpol peserta Pemilu, pengamanan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat;
- b. Menggelar operasi cipta kondisi untuk memantapkan kondisi Kamtibmas agar tetap kondusif selama berlangsungnya tahapan Pemilu;
- c. Melakukan dialog dengan memanfaatkan lembaga adat dan melibatkan tokoh adat guna terwujudnya keharmonisan antar peserta Pemilu;
- d. Menyusun nota kesepakatan antara peserta Pemilu dengan Polsek untuk menjaga agar Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu;
- e. Menjaga dan mengurangi perbedaan pendapat antar para peserta Pemilu dan berusaha untuk mengarahkannya kepada suatu persepsi yang sama;

- f. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para peserta Pemilu agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas, tentunya dengan tetap menjaga netralitas; dan
- g. Mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang provokatif

### **Saran**

Polri sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sejatinya haruslah dekat dengan persoalan fisik dan psikis masyarakat, karena diantara kemungkinan-kemungkinan konflik yang bisa terlihat dalam bentuk perubahan fisik (ekspresi) ada juga potensi konflik yang tersembunyi dibalik ekspresi itu.

Masih ada masyarakat yang tidak ingin menyampaikan langsung kepada aparat keamanan terkait pelanggaran-pelanggaran, potensi konflik, dan lain-lain. Itu dikarenakan ketidakdekatan aparat dengan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat selaku penjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga pihak kepolisianlah yang harus lebih mendekati kepada masyarakat agar lebih diketahui apa yang terjadi dibalik sikap yang tampak dari masyarakat, dan agar keamanan dan ketertiban dapat benar-benar terjaga, apabila belum maka akan segera tercipta.

*Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Tungkal Ulu Menjaga Keamanan Dan  
Keteraturan Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
( Studi Kuala Dasar )*

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*,  
Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.2016
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2014
- Edwar, *Supremasi Hukum DI Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indragiri Pada Jurnal Litigasi, 2012.
- Fajlurrahman Jurdi, *pengantar hukum pemilihan umum*, kencana,
- Firdaus. “*penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan  
Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”,  
(Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum :edisi revisi*, (Surabaya: Kencana,  
2005)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2005